BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era kemajuan teknologi ini tata kelola pemerintahan dituntut untuk bertransformasi ke arah yang lebih transparan, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah melalui *e-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta keterbukaan informasi.¹ Penerapan *e-Government* di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. SPBE merupakan sistem pemerintahan yang mengintegrasikan proses, informasi, dan teknologi secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan layanan pemerintahan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.

Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang penting dalam mendukung penyelenggaraan SPBE dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penggunaannya memungkinkan pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat secara *real-time*, dua arah, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Namun, keberhasilan pemanfaatan media sosial sebagai

¹ Maisharah Maisharah, "Analisis Kesiapan Teknologi Pemerintahan (E-readiness) Dalam Mewujudkan E-Government di Kabupaten Balangan" (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7694>.

sarana penyampaian informasi publik tidak terlepas dari bagaimana strategi komunikasi dirancang dan dijalankan secara efektif. Hal ini mencakup aspek perencanaan pesan, segmentasi audiens, pemilihan platform, hingga manajemen interaksi dengan masyarakat digital.

Strategi komunikasi yang diterapkan dalam manajemen strategis berperan penting dalam memastikan penyampaian pesan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam proses manajemen strategis, komunikasi menjadi sarana utama untuk menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal seperti karyawan maupun eksternal seperti masyarakat, pelanggan, dan mitra bisnis. Komunikasi yang terencana dan strategis membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi.

Implementasi SPBE bukan hanya tentang membangun infrastruktur digital, melainkan juga menyangkut bagaimana pemerintah menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui informasi publik sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. Unsur komunikasi dalam proses keterbukaan informasi membuat pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankan aktivitas komunikasi secara strategis.²

² Kharisma Nur Rohmah, "Strategi Komunikasi Diskominfo Kabupaten Ponorogo Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

Keterbukaan informasi memuat penyebaran informasi, maksudnya dapat dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan baik melalui pertemuan-pertemuan, sosialisasi, media seperti buku, majalah, surat kabar, film, televisi, radio, musik, game, media sosial dan sebagainya. Pada dasarnya tujuan diseminasi informasi lebih dititikberatkan pada “memberitahu” (*information*) atau paling tidak dengan informasi tersebut komunikan dapat mengubah sikap (*attitude*).³

Kurangnya diseminasi (proses penyebaran) informasi dapat menyebabkan ketertinggalan informasi bagi masyarakat, sehingga program-program layanan dan informasi tidak berdampak terhadap perkembangan kehidupan untuk mendapatkan kemudahan, akuntabel dan transparansi (Firdaus, dkk. 2021).⁴

Dalam perspektif Islam, keterbukaan informasi juga memiliki dasar yang kuat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan penyampaian informasi yang benar. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisā ayat 58:⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

ۙ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۙ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah*

³ Anjang Priliantini, Kusumajanti Suwanto, and Mega Purnama Sari, “Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Public Awareness,” *Jurnal Komunikasi : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 7, no. 3 (December 8, 2018), <https://doi.org/10.31504/komunika.v7i3.1630>, 120.

⁴ Yayat Sudrajat, “Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Di Kabupaten Mamuju,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 1 (2023), 288

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya Kemenag RI, QS. An-Nisa, 4:58.

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Q.S An-Nisā' ayat 58.

Ayat ini memerintahkan untuk menunaikan amanah dengan benar kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Allah menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab, terutama dalam urusan publik. Dalam konteks informasi, transparansi adalah bentuk amanah dan keadilan. Oleh karena itu, pihak berwenang, seperti pemerintah, wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara terbuka dan jujur.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Balangan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Diskominfo tidak hanya memberikan pemahaman terkait kebijakan dan layanan publik, tetapi juga aktif melakukan publikasi serta promosi informasi melalui berbagai *platform*, termasuk media sosial, sebagai bagian dari strategi komunikasi.

Peran aktif ini turut mendorong keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Balangan. Berdasarkan data dari Bimtek Penyusunan Domain Tata Kelola dan Domain Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Balangan berhasil meraih Indeks SPBE 2024 sebesar 3,34 dengan predikat "Baik", mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2023 yang hanya memperoleh nilai 2,69 dengan

predikat “Cukup”.⁶ Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam tata kelola, integrasi layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi publik di daerah.

Namun demikian, penggunaan media sosial oleh Diskominfo Kabupaten Balangan masih menghadapi beberapa kekurangan yang perlu diatasi. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa *platform* media sosial yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Balangan masih kurang dikenal masyarakat dan masih mengalami kendala-kendala teknis yang menghambat penyampaian informasi di beberapa *platform* sosial medianya. Hal ini menyebabkan jangkauan penyebaran informasi tersebut menjadi terbatas dan tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Kelemahan-kelemahan ini dapat menghambat Diskominfo Kabupaten Balangan dalam menjalankan fungsinya untuk menyebarluaskan informasi yang penting dan mendukung transparansi serta partisipasi publik.

Padahal jika dilihat dari manfaat dan pentingnya penggunaan media sosial, ini bisa menjadi pendukung implementasi dari SPBE supaya memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya strategi komunikasi yang sesuai, akan memudahkan proses penyampaian informasi publik dengan penggunaan berbagai media komunikasi, termasuk memaksimalkan media sosial yang ada guna meningkatkan kualitas dan citra Diskominfo Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

⁶ M Ferian Sadikin, “Dorong Percepatan Penerapan SPBE, Pemkab Balangan Gelar Bimtek Tata Kelola dan Manajemen,” *Tabirkota.com* (Balangan), 29 April 2025, tabirkota.com/2025/04/dorong-percepatan-penerapan-spbe-pemkab-balangan-gelar-bimtek-tata-kelola-dan-manajemen/.

Melalui analisis pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mendeskripsikan strategi komunikasi penyebaran informasi publik yang dipakai oleh Diskominfo Kabupaten Balangan melalui media komunikasi yaitu media sosial yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik (PIKP), selain itu dapat menganalisis keberhasilan atau efektivitas strategi komunikasi tersebut, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta hambatan dalam penyebaran informasi publik di masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam tentang penggunaan strategi komunikasi terhadap penyebaran informasi Diskominfo Kabupaten Balangan, sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja dan dampak positif terhadap aktifitas penyebaran informasi publik yang lebih efektif. Hasil penelitian ini akan disusun dalam skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika Dan Persandian Kabupaten Balangan Dalam Penyebaran Informasi Publik Di Media Sosial”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi publik di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan strategi komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi publik melalui media sosial.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi ilmu pengetahuan di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hasil penelitian ini untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi, dan penerapan strategi komunikasi di instansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori komunikasi, dengan mengeksplorasi berbagai strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai *audiens* publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mendalami lebih jauh tentang strategi komunikasi publik di era digital, sekaligus membantu dalam merumuskan strategi komunikasi yang relevan dengan dinamika komunikasi pemerintahan melalui media sosial.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi atau referensi guna pengelolaan media sosial yang diharapkan lebih maksimal dalam upaya penyebaran informasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik di era

digital, memastikan informasi yang disampaikan lebih cepat, tepat, dan akurat sampai ke masyarakat. Penelitian ini juga bisa membantu dalam perancangan cara memaksimalkan penggunaan berbagai *platform* media sosial untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan, serta meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi dengan pemerintah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Balangan, sehingga penerimaan informasi publik lebih berdampak dan direspon baik oleh masyarakat.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dalam Penyebaran Informasi Publik di Media Sosial". Definisi operasional merupakan penjabaran konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur dan dianalisis secara sistematis. Maka dalam penelitian ini untuk menetapkan batasan penelitian, Peneliti menegaskan penjelasan sebagai berikut.

1. Strategi Komunikasi

Secara harfiah strategi adalah teknik individu atau organisasi dalam menggunakan teknik, keterampilan, dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dan dengan demikian memperoleh manfaat yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan Komunikasi memiliki arti proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, dan pendapat antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama dan membangun hubungan yang efektif.

Strategi Komunikasi berarti serangkaian langkah yang melibatkan identifikasi tujuan komunikasi, analisis audiens, pemilihan saluran atau media, pengembangan pesan, dan evaluasi hasil komunikasi. Dengan strategi komunikasi ini berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat.⁷ Komunikasi strategis memiliki tujuan dan rencana, yang di dalamnya alternatif dipertimbangkan dan keputusan dijustifikasi. Komunikasi strategis didasarkan pada riset dan dapat dievaluasi pada akhirnya. Komunikasi strategis beroperasi dalam lingkungan tertentu, yang melibatkan organisasi dan kelompok orang yang memengaruhinya dengan cara tertentu.⁸

Muhammad Arni mendefinisikan mengenai strategi komunikasi yaitu semua yang terkait mengenai rencana dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengirim, pesan dan penerimanya pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁹

Dari pengertian diatas strategi komunikasi dalam penelitian ini berarti serangkaian perencanaan dan tindakan komunikasi yang dilakukan secara sistematis oleh Diskominfo Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan penyebaran informasi publik secara efektif. Strategi ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari proses identifikasi

⁷ Edi Suryadi, *Strategi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2022), 5-6.

⁸ Deborah A. Silverman dan Ronald D. Smith, *Strategic Planning for Public Relations*, 7 ed. (Routledge, 2024), <https://doi.org/10.4324/9781003348467>.

⁹ Muhammad Arni, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 61.

pesan, pemilihan saluran komunikasi, penentuan *audiens* sasaran, penyesuaian gaya dan format komunikasi, serta efek hasil penyampaian pesan.

2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Balangan

Untuk membantu pemerintah mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai praktisi kehumasan pemerintah dengan bekerja sebagai penghubung, penerjemah, dan mediator. Dengan komunikasi timbal balik ini, dapat tercipta pengertian, kepercayaan, rasa hormat, dukungan, dan toleransi yang baik dari publik internal dan eksternal.¹⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi serta aktivitas komunikasi dan informatika kepada khalayak atau masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Balangan termasuk lembaga pemerintahan yang menjalankan strategi komunikasi untuk penyebaran informasi publik melalui media sosial guna meningkatkan transparansi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan daerah. Tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Balangan tidak jauh berbeda dengan Diskominfo lain pada umumnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan nomor 83 tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

¹⁰ Desna Aryana Pratiwi dan Amri Dunan, "Communication Strategy Of Government Public Relations Depok City In Managing Covid-19 Information During Pandemic On *Instagram*," *International journal of educational research and social sciences* 2, no. 4 (2021), <https://doi.org/doi.org/10.51601/ijersc.v2i4.90>.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi dan penyelenggaraan statistik sektoral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Penyebaran Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

Nyarwi Ahmad dalam buku berjudul Dasar-Dasar Komunikasi Publik menjelaskan bahwa pengertian publik di mata para ilmuwan sosiologi politik merupakan anggota dari entitas yang harus disatukan oleh sebuah kesadaran bersama yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan harus mempunyai kemampuan berpikir atau *capable of thought*.¹¹

Dari perspektif kemajuan teknologi sekarang, dokumen atau informasi dalam layanan publik dapat dikaitkan dengan tahap awal penyajian dan interaksi dengan informasi dalam komunikasi dua arah. Dari perspektif ini,

¹¹Kumparan.com, *Mengetahui Pengertian Publik dalam Sosiologi dan Contohnya*, di akses dari <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengetahui-pengertian-publik-dalam-sosiologi-dan-contohnya-20xT6GJpiOP/4> , pada tanggal 16 Februari 2025 pukul 20.10.

tindakan kunci dalam menyediakan dokumen bagi warga negara adalah digitalisasi informasi berbasis kertas, yang kemudian dapat diakses dari jarak jauh melalui web atau surel. Saat ini, sejumlah besar dokumen diproduksi secara digital, tanpa pernah dicetak (Priebe, Welch & MacGilvray, 2008).¹²

Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Komunikasi dan Informatika lainnya, yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹³

Dalam penelitian ini, penyebaran informasi publik oleh Diskominfo Kabupaten Balangan yang dimaksud adalah dengan diukur melalui beberapa indikator operasional, seperti dilihat dari jenis dan relevansi informasi yang disampaikan, mencakup informasi penting seperti kebijakan pemerintah daerah, layanan publik, program kerja, maupun edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang relevan akan lebih mudah diterima dan berdampak positif terhadap keterlibatan publik. Kedua, keterbukaan informasi dan kemudahan akses juga menjadi indikator

¹² Leonardo Madariaga dkk., "User Experience of Government Documents: A Framework for Informing Design Decisions," *Government Information Quarterly* 36, no. 2 (2019): 179–95, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.005>.

¹³ Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: 10/per/m.kominfo/07/2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. hl. 6

penting, yang mencerminkan sejauh mana Diskominfosan menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang disampaikan harus bersifat terbuka, tidak menyesatkan, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform media sosial yang digunakan.

4. Media Sosial

Media sosial adalah suatu *platform* dengan fasilitas yang membuat penggunaanya dalam hal ini masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini bisa seperti komunikasi sebagai interaksi sosial dengan mengirim atau memberi informasi, berbagi foto dan video dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.

Dikutip dari brintannica.com Media sosial bisa dianggap sebagai bentuk media massa, terutama dalam konteks komunikasi yang luas dan interaktif di internet. Media massa adalah alat komunikasi yang menjangkau khalayak luas, dan media sosial memenuhi kriteria ini melalui berbagai *platform* seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan lain-lain.

Media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, berdiskusi, berkolaborasi dan menciptakan isi dengan berbagai jenis *platform* yang tersedia. Cahyono dalam Evi Novianti, 2020 menyebutkan media sosial merupakan sebuah media online, dimana para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, berdiskusi,

berkolaborasi dan menciptakan isi dengan berbagai jenis *platform* yang tersedia.¹⁴

Maka dari itu, dalam penelitian ini media sosial yang dimaksud adalah media sosial Diskominfo Kabupaten Balangan yang merujuk pada *platform* digital publik yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi, dengan indikator yang mencakup jenis media sosial yang digunakan, yaitu *Youtube, Instagram, Facebook, dan TikTok*, dengan pola dan frekuensi unggahan konten informasi, serta interaksi seperti jumlah tayangan, suka, serta respon atau tanggapan seperti komentar dan permohonan informasi dari masyarakat.

¹⁴ Evi Novianti et al., "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran)," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i0.1499>, 49.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian serupa untuk membantu Peneliti menemukan hubungan atau perbandingan untuk sebuah pemikiran baru pada penelitian selanjutnya.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Thesis, Strategi Penyampaian Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara ¹⁵	Izzat Ibrahim Hasibuan, (2020)	Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif dalam strategi komunikasinya.	Dan perbedaannya terletak pada tempat, subjek dan objek penelitian yang berbeda, sehingga hasil penelitian berbeda pula.
2.	Skripsi, Strategi Komunikasi Diskominfo Kabupaten Ponorogo Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat ¹⁶	Kharisma Nur Rohmah, (2023)	Kesamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah cakupan strategi komunikasi yang ada pada Diskominfo Kabupaten.	Perbedaan pada keduanya adalah pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya mendeskripsikan strategi komunikasi pada pelayanan informasi, sedangkan pada penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi penyebaran informasi publik.
3.	Jurnal, Strategi Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten	Evi Hafizah, Selyani, Amalia Irfani, Eceh Trisna Ayu, (2023)	Kesamaan antara penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan	Perbedaannya ada pada objek penelitian, objek penelitian ini adalah tentang informasi pembangunan

¹⁵ Izzat Ibrahim Hasibuan, "Strategi Penyampaian Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara" (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

¹⁶ Rohmah, "Strategi Komunikasi Diskominfo Kabupaten Ponorogo Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat."

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Mempawah Dalam Memberikan Informasi Tentang Pembangunan Daerah ¹⁷		kualitatif, dengan metode deskriptif	daerah, sedangkanPenelitime neliti objek tentang informasi publik.
4.	Jurnal, Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran) ¹⁸	Evi Novianti, Aat Ruchiyat Nugraha, Lukiat Komalasari, Kokom Komariah, Diah Sri Rejeki. (2020)	Kesamaan penelitian ini adalah pada teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, subjek penelitian sebelumnya adalah sekretariat daerah, sedangkanPenelitime milih Diskominfo Kabupaten.
5.	Jurnal, Implementasi Website Sebagai Media Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur ¹⁹	Richa Andriyani, Sabaruddin. (2023)	Kesamaan yang ada pada masing-masing penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya adalah aktivitas implementasi website sebagai media informasi publik, sedangkan penelitian ini memilih objek penelitian pada sosial media dalam penyebaran informasi publik.

¹⁷ Evi Hafizah dkk., “Strategi Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mempawah Dalam Memberikan Informasi Tentang Pembangunan Daerah” *Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 4 (Desember2023), <https://doi.org/10.36085/madia.v4i1.6061>.

¹⁸ Novianti dkk., “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran).”

¹⁹ Richa Andriyani dan Sabaruddin Sabaruddin, “Implementasi Website Sebagai Media Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 5, no. 2 (2023): 124–41, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.3733>.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa strategi komunikasi pemerintah daerah melalui media sosial merupakan hal yang penting dan terus berkembang. Namun, pada penelitian ini akan menganalisis pendekatan yang lebih menyeluruh dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi komunikasi yang secara khusus membahas strategi komunikasi Diskominfo Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi publik melalui media sosial.

Selain itu, konteks lokal Kabupaten Balangan yang memiliki karakteristik masyarakat, geografis, dan pola komunikasi yang berbeda dari wilayah lain juga belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Diskominfo Kabupaten Balangan merancang dan menerapkan strategi komunikasi digital dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat melalui media sosial.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disusun secara sistematis sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas segala sesuatu yang mengantarkan ke arah tujuan pembahasan diantaranya: Latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan teori-teori/kerangka pikir yang mendukung penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Metode Penelitian diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang didapat dan pembahasan mengenai penelitian yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi penjelasan mengenai simpulan penelitian dan berisi saran-saran.